



**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DILIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA
DI DESA BENTOT KECAMATAN PATANGKEP
TUTUI KABUPATEN BARTIM**

Endang ; Rahmi Hayati

Email : endangrury79@gmail.com , Rahmi.Hayati777@gmail.com

Program Studi Adminitrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olah Raga Sarabakawa Pembataan Tanjung – Tabalong
Telp/Fax (0526)2022484 Kode Pos 70123
Email. : info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa 1). Implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya di desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur, 2). Faktor – faktor yang menghambat Implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya di desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis menurut Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Implementasi aplikasi sistem keuangan desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dikategorikan terimplementasi, 2). Faktor – faktor yang menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur adalah (a) misi dan tujuan organisasi, (b) strategi perencanaan, (c) kebijaksanaan pemerintah, (d) jenis teknologi dan sosial budaya.

Kata kunci : Implementasi, siskuedes, faktor – faktor penghambat siskuedes

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM APPLICATION
(SISKEUDES) JUDGING BY THE RESOURCE ASPECT IN THE VILLAGE OF
BENTOT PATANGKEP TUTUI SUB-DISTRICT BARTIM REGENCY**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze 1). The implementation of the budget of the village financial system is seen from the resource aspect in the village of Bentot Patangkep Tutui sub-district East Barito Regency, 2). Factors that hinder the implementation of the budget of the village financial system are seen from the aspect of resources in the village of Bentot Patangkep Tutui sub-district East Barito Regency. The research method used in this study is qualitative deskriptif. The technique used for data collection is interviews. Data analysis techniques use analysis according to Miles Huberman. The results showed that 1). The implementation of the application of the financial system of Bentot Patangkep Tutui sub-district East Barito Regency is categorized as implemented, 2). Factors that hinder the implementation of the application of the financial system of Patangkep Tutui Sub-District east Barito Regency are (a) the mission and objectives of organization, (b) planning strategy, (c) government policy, (d) technology and socio-cultural types.

Keywords : Implementation, siskuedes, factors – inhibitory factors siskuedes

PENDAHULUAN

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa. Desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mendukung nawacita itu, pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata setiap des mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta.

Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp. 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sebagaimana yang tercantum dalam Nawacita, sumber pendapatan Pemerintah Desa tidak hanya berasal dari Dana Desa yang jelas-jelas sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saja. Melainkan dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 juga menyampaikan bahwa sumber pendapatan keuangan desa itu bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dengan begitu banyaknya anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa, maka pertanggungjawabannya pun menjadi besar. Kepala Desa sebagai yang Bertanggungjawab atas keuangan desa harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini pemerintah desa wajib menyusun laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Mengingat tanggungjawab Kepala Desa sangat besar dalam pengelolaan keuangan desa, maka diperlukan pelibatan masyarakat guna menciptakan transparansi pengelolaan keuangan desa. Pelibatan masyarakat desa bisa direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Sehingga program kinerja dan kegiatan yang tersusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Tidak hanya itu Pemerintah Desa juga harus melakukan pencatatan atau melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tidak hanya Kepala Desa yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan desa, namun semua perangkat desa juga mempunyai perannya masing-masing dalam pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa dan Kepala Desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa harus mempunyai pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena pengelolaan keuangan desa sendiri sudah diatur secara rinci dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya risiko yang cukup tinggi atas pengelolaan keuangan desa (korupsi), maka diperlukan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Selain pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota harus turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan melakukan pendampingan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas , maka secara objektif penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini mendukung indteori Edward III tentang implementasi dengan indikator sumber daya yaitu staf, informais, wewenang, dan fasilitas.

- a. Mendukung penelitian terdahulu oleh Ismail (2019) yang menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa belum optimal serta tidak mendukung penelitian terdahulu oleh Sulistyowati (2019), Fajar Eko Agung Prakoso (2018), Cahyo Lukito (2018), dan Aziza Novirania (2018) yang menyimpulkan implementasi Sistem Keuangan Desa sudah berjalan dengan baik.

Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan

masukn bagi pemerintah daerah di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim dalam upaya meningkatkan implementasi Sistem Keuangan Desa dimasa mendatang.

- b. Sebagai penambah khasanah dalam memperkaya penelitian ilmiah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bartim, khususnya pada program studi Administrasi Publik.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

- a. Menurut Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab, 2008:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
- b. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan

prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap sebagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative.

- a. Menurut Thomas R. Dye (LAN, 2008: --5), “*Public policy is whatever the government choose to do or not to do* (Kebijakan public adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan public merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, ini merupakan kebijakan public yang tentunya ada tujuannya.
- b. William N. Dunn (2013:39) mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan—pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.
- c. Chandler dan Plano (2013:38) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk

memecahkan masalah publik dan pemerintah.

- d. Menurut David Easton (LAN, 2008: 5), “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

Adapun berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan tersebut diartikan baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

3. Model Implementasi Kebijakan

Para ahli kebijakan juga mengajukan beberapa model implementasi kebijakan untuk keperluan penelitian maupun analisis. Model-model yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kebijaksanaan yang semakin kompleks, untuk itu diperlukan teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Berikut adalah model-model

implementasi kebijakan :

Implementasi Kebijakan Publik menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Agustino, 2014:142-144) terdapat

6 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan Publik yaitu :

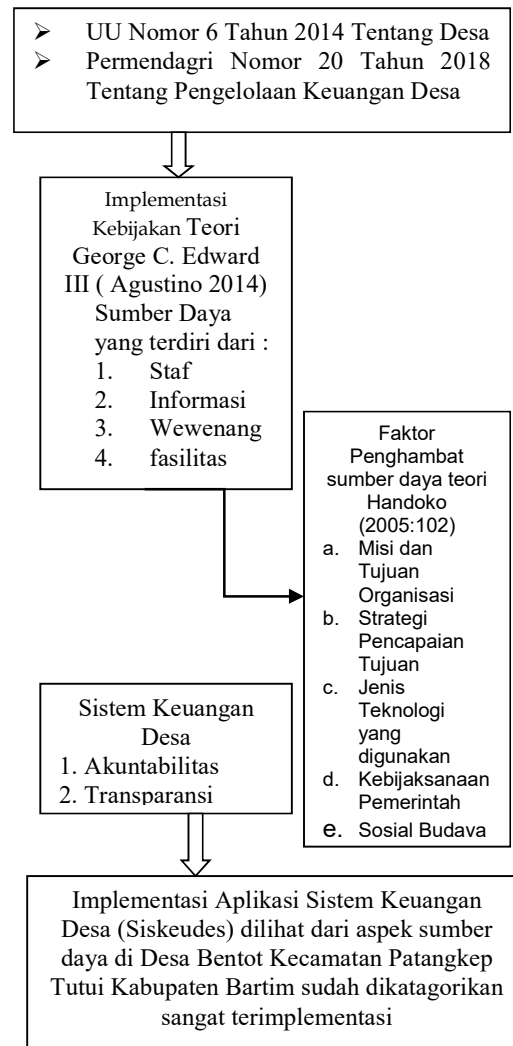
1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika – dan- hanya- jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio- kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya tyang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit diharapkan.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nanang Martono (2015:197), penelitian deskriptip merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Pendekatan kualitatif

menurut Sugiyono (2017:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Berdasarkan metode penelitian diatas, diharapkan dapat menggambarkan mengenai implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim, serta menggambarkan faktor apa sajakah yang menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dapat diperoleh, mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dari pernyataan, wawancara, catatan, dan pengamatan

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informen atau responden), Martono:2012. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara mendalam.

Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam pelaksanaan observasi (partisipasi observasi) ialah peneliti melakukan pengamatan secara langsung dalam waktu sementara menjadi orang dalam atau menjadi dari komunikasi yang diobservasi atau diteliti.

Mengumpulkan dokumen atau sering disebut metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono,2014). Melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan bacaan dan informasi yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif Miles and Huberman. Miles dan Huberman (2014) secara umum menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses penting. Tiga diantaranya dapat dilakukan secara berulang karena proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan kapan saja, dalam arti proses ini tidak harus dilakukan ketika peneliti telah menyelesaikan seluruh

proses penelitian. Keempat proses penting dalam teknik analisis data Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa (siskuedes) dilihat dari aspek sumber daya didesa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur yang diuraikan berdasarkan hasil wawancara.

Wawancara

Untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa (siskuedes) dilihat dari aspek sumber daya didesa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari indikator sumber daya seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Serta untuk mengetahui faktor – faktor penghambat sumber daya dalam implementasi aplikasi sistem keuangan desa.

Pembahasan Hasil Wawancara

1. Staf

Kemampuan dan jumlah staf sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam mengimplementasikan aplikasi sistem keuangan desa di kantor desa Bentot kemampuan staf yang berkontribusi dalam mengimplmentasikan aplikasi sistem keuangan desa sudah mampu dan jumlah

staf yang berkontribusi pun sudah mencukupi dalam mengimplementasikan aplikasi keuangan desa. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dimana informan mengatakan staf sudah mampu mengoprasikan aplikasi siskuedes, ada yang mengatakan jumlah staf sudah mencukupi dalam mengoprasikan aplikasi tersebut dan ad yang mengatakan belum mencukupi.

Jadi berdasarkan indikator staf, maka implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya dikategorikan terimplementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Suistyowati (2019), Fajar Eko Agung Prakoso (2018), Cahyo Lukito (2018) dan aziza Novirania (2018) yang kesimpulannya implementasi aplikasi sistem keuangan desa sudah berjalan dengan baik dan optimal.

2. Informasi

Para petugas desa Bentot sudah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat setempat. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dimana informasi mengatakan petugas sudah memberikan informasi tentang laporan keuangan desa Bentot secara transparan.

Jadi berdasarkan indikator informasi, maka implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya dikategorikan terimplementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Suistyowati (2019), Fajar

Eko Agung Prakoso (2018), Cahyo Lukito (2018) dan aziza Novirania (2018) yang kesimpulannya implementasi aplikasi sistem keuangan desa sudah berjalan dengan baik dan optimal.

3. Wewenang

Para petugas desa Bentot sudah melaksanakan pertanggung jawaban laporan keuangan secara transparan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dimana informan mengatakan petugas sudah melaksanakan pertanggung jawaban sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Jadi berdasarkan indikator wewenang, maka implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya dikategorikan terimplementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Suistyowati (2019), Fajar Eko Agung Prakoso (2018), Cahyo Lukito (2018) dan aziza Novirania (2018) yang kesimpulannya implementasi aplikasi sistem keuangan desa sudah berjalan dengan baik dan optimal.

4. Fasilitas

Fasilitas yang ada di desa Bentot sudah mencukupi dalam mendukung pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara transparan. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dimana informan mengatakan fasilitas di desa Bentot sudah mencukupi dalam mendukung

pertanggung jawaban laporan keuangan desa secara transparan.

Jadi berdasarkan indikator fasilitas, maka implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya di kategorikan terimplementasi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Suistyowati (2019), Fajar Eko Agung Prakoso (2018), Cahyo Lukito (2018) dan aziza Novirania (2018) yang kesimpulannya implementasi aplikasi sistem keuangan desa sudah berjalan dengan baik dan optimal.

5. Faktor – faktor Penghambat

Dari 5 (lima) faktor – faktor penghambat sumber daya, yaitu misi dan tujuan organisasi, strategi perencanaan, jenis teknologi, kebijaksanaan pemerintah dan sosial budaya. Benar bahwa ke 5 (lima) faktor – faktor tersebut menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dimana 4 (empat) orang informan mengatakan semua faktor – faktor tersebut benar menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya dan 1 (satu) orang informan mengatakan ada 3 faktor diantara 5 faktor – faktor tersebut yang tidak menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya.

Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat 5 (lima) faktor yang

menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa dilihat dari aspek sumber daya yaitu misi dan tujuan organisasi, strategi, perencanaan, jenis teknologi, kebijaksanaan pemerintah dan sosial budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan :

1. Implementasi aplikasi sistem keuangan desa (siskuedes) dilihat dari aspek sumber daya di desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur berdasarkan teori Implementasi dari George C Edward III dikategorikan sangat terimplementasi.
2. Faktor – faktor yang menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa (siskuedes) dilihat dari aspek sumber daya di desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur adalah a. Isi dari tujuan organisasi,
 - b. Strategi perencanaan,
 - c. Jenis teknologi,
 - d. Kebijaksanaan pemerintah
 - e. Sosial budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwipayana, A., & Sutoro, E. (2003). *Membangun Good Governance di Desa.*, Yogyakarta: IRE Press.
- Dwipayana, A. (2003). *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoko, T. H. (2005). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Jogiyanto, H. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 2004-2005*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, A. (2011). *Perencanaan dan Implementasi Sistem Basis Data*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail. (2019). *Implementation Of Village Financial System Policy Requiring Village Financial Administration In Indonesia*. *UIN Sunan Gunung Djati*.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kelola/article/view/5585>
- Lukito, C. (2018). *Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro*. *FISIP Universitas Bojonegoro*.

<http://ejournalunigoro.com/sites/default/files/6.%20Cahyo.pdf>

Novirana, A. (2018). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. *Universitas Lampung*.
<https://onsearch.id/Record/IOS4198.30825>

Prakoso, F. E. A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Universitas Pancasakti Tegal*.
<http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/igi/article/view/1214/0>

Susilowati. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *Universitas Muhammadiyah Jember*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/21056>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

PMK Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa.